

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

| T | NOMOR SOP | OT.02.02/C.X.7/2584/2024 |
|---|-------------------------|--|
| Ī | TGL. PEMBUATAN | 31 Maret 2023 |
| | TGL. REVISI / REVISI KE | 12 September 2025 / 2 |
| | TGL. EFEKTIF | 17 September 2025 |
| Ì | DISAHKAN OLEH | Kepala, |
| | RAY | Kemenkes EMMILYA ROSA, SKM, MKM NIP 197305251997032001 |
| | NAMA SOP | PENEMPATAN DAN PENGHAPUSAN JABATAN |

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memahami dasar hukum dan ketentuan mengenai peta jabatan
- 2. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Komputer, printer, ATK dan koneksi Internet
- Data Kepegawaian (SIMKA, Silk Arsip, dll)
- 3. Aplikasi SRIKANDI dan TNDE BKK Palembang

PERINGATAN

- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menyebabkan proses penempatan dan penghapusan jabatan tidak sesuai ketentuan
- 2. Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
- 3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
- 4. Monitoring dan evaluasi secara berkala

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
- Merupakan Turunan Proses Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana dari Proses Bisnis Penyelenggaraan Administrasi, Manajemen, dan Dukungan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEMPATAN DAN PENGHAPUSAN JABATAN

| | | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | |
|----|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-----------|---|------------|
| No | Kegiatan | Kepala Kantor | Kasubbag Administrasi Umum | Analis Kepegawaian | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| | Menginstruksikan kepada Kasubbag Administrasi Umum untuk mengevaluasi jabatan (penempatan/penghapusan) | | | | Nota Dinas | 5 menit | Disposisi nota dinas | |
| | Menginstruksikan analis kepegawaian untuk menyiapkan data untuk evaluasi jabatan | | | | Disposisi nota dinas | 5 menit | Disposisi nota dinas | |
| | Menyiapkan surat dan data evaluasi jabatan berupa analisa jabatan/ analisa beban kerja dan peta jabatan | | | - | Disposisi nota dinas | 120 menit | Surat dan data evaluasi jabatan | |
| 4 | Memeriksa dan mereview evaluasi jabatan | | \rightarrow | | Surat dan data evaluasi jabatan | 15 menit | Surat dan data evaluasi jabatan | |
| 4 | Memeriksa dan mereview evaluasi jabatan | \rightarrow | | | Surat dan data evaluasi jabatan | 15 menit | Surat dan data evaluasi jabatan | |
| | Menandatangani surat dan data evaluasi jabatan untuk diteruskan ke hukormas P2P | | | | Surat dan data evaluasi jabatan | 5 menit | Surat dan data evaluasi jabatan | |
| 6 | Mengirimkan surat dan data evaluasi jabatan ke hukormas P2P | | | | Surat dan data evaluasi jabatan | 60 menit | Arsip | |
| | Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan melaporkan ke Kepala Kantor | | | | SOP Penempatan dan Penghapusan Jabatan | | Bukti hasil monitoring dan evaluasi kegiatan | |

Riwayat Perubahan

| No. | Tanggal Perubahan | Revisi Ke- | Deskripsi Perubahan | Disetujui Oleh |
|-----|-------------------|------------|--|--|
| 1 | 31 Maret 2023 | 0 | Pembuatan SOP | Kepala BKK Kelas I Palembang Emmilya Rosa, SKM, MKM |
| 2 | 12 Juli 2024 | 1 | Perubahan kode penomoran SOP menjadi OT.02.02 Penambahan dasar hukum Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Penambahan 3 (tiga) keterangan pada Peringatan terkait : tolak gatifikasi pelayanan prima monitoring dan evaluasi | Kepala BKK Kelas I Palembang Emmilya Rosa, SKM, MKM |
| 3 | 12 September 2025 | 2 | Perubahan nama direktorat menjadi Direktorat Penanggulangan Penyakit Perubahan peta proses bisnis penyelenggaraan karantina kesehatan Penambahan dasar hukum Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik | Kepala BKK Kelas I Palembang Emmilya Rosa, SKM, MKM |